

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PERJUANGAN KAUM PEREMPUAN DALAM SURAT KABAR *POETRI HINDIA* 1908-1911

Ayu Septiani, M.Hum.¹

Dosen Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat, 45363
Email: ayu.septiani@unpad.ac.id

Abstract: *This paper discusses Implementation of the values of women's struggle in Poetri Hindia Newspaper 1908-1911. The elements discussed in this paper include women's lives in the end of the 19th century until beginning of the 20th century, the publication of the Poetri Hindia newspaper, and the values of women's struggle in that newspaper. Poetri Hindia newspaper as the first newspaper for women with Melayu language and contains ideas struggle for the improvement of women must have significance in the study of women's history in Indonesia. At that time, few newspapers wrote about indigenous women, even rare indigenous women whose ideas were published in the newspaper. To discuss these elements used historical methods.*

Keywords: *Situs Astana Gede Kawali, a source of learning*

Abstrak: Tulisan ini membahas implementasi nilai-nilai perjuangan kaum perempuan dalam Surat Kabar Poetri Hindia tahun 1908-1911. Adapun unsur yang dibicarakan dalam tulisan ini meliputi kehidupan perempuan akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terbitnya Surat Kabar *Poetri Hindia*, dan nilai-nilai perjuangan kaum perempuan dalam surat kabar tersebut. Surat Kabar *Poetri Hindia* sebagai surat kabar pertama khusus perempuan yang berbahasa Melayu dan banyak memuat ide-ide perjuangan bagi kemajuan kaum perempuan tentunya memiliki arti penting dalam kajian sejarah perempuan di Indonesia. Pada masa itu, masih sedikit surat kabar yang menuliskan tentang perempuan pribumi, bahkan masih jarang perempuan pribumi yang idenya dipublikasikan dalam sebuah artikel di surat kabar. Untuk membahas permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan metode sejarah.

Kata Kunci: Nilai-nilai perjuangan, Perempuan, Surat Kabar Poetri Hindia

¹ Staf Pengajar di Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat, 45363
ayu.septiani@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Kehidupan perempuan bangsawan pribumi pada akhir abad ke-19 dibatasi oleh adat istiadat² yang mengekang keinginan mereka untuk secara bebas mengekspresikan diri. Adat istiadat membatasi kegiatan mereka hanya pada urusan rumah tangga. Mereka bertugas melayani kebutuhan kaum pria yang menjadi suaminya. Kemudian, ketika ditinggal wafat oleh suami atau disia-siakan para suami, mereka tidak dapat berbuat banyak. Dengan kata lain, pada masa itu, kaum perempuan bangsawan pribumi sangat tergantung kepada kaum pria. Mereka tidak berdaya ketika mengetahui suaminya berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan tidak bisa menuntut hak ketika diceraikan oleh suaminya. Begitu pula dengan para gadis, mereka tidak diizinkan untuk bersekolah dan harus membatasi diri dalam bergaul dengan laki-laki. Aturan-aturan tidak tertulis seperti norma kesopanan dan kesusilaan membatasi ruang gerak perempuan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menunjukkan siapa dirinya.

Oleh karena itu, munculah ide-ide kemajuan di kalangan perempuan bangsawan pribumi untuk menuntut persamaan hak agar dapat bersekolah, bebas dalam bergaul, bekerja selain pekerjaan rumah tangga seperti perawat, guru, dan sebagainya. Ide tersebut diawali dengan munculnya kesadaran menulis. Menulis tentang diri mereka sendiri karena mereka selalu diceritakan sebagai *the other* (yang dilainkan) oleh laki-laki (Cixous dalam *Jurnal Perempuan*, 2007: 125). Kesadaran menulis ini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki kesadaran berpikir untuk mengubah nasib mereka, dari yang terpenjara oleh adat istiadat menjadi manusia bebas yang dapat mengekspresikan diri dengan potensi yang dimiliki.

Pada awalnya, para perempuan pribumi menulis dalam catatan harian mereka sendiri. Hal tersebut disebabkan belum tersedianya wadah untuk menaungi ide-ide mereka. Baru

kemudian, atas prakarsa Tirta Adhi Soerjo, diterbitkanlah surat kabar khusus perempuan. Dikatakan khusus perempuan karena mulai dari redaktur, penulis, dan target pembacanya adalah perempuan. Surat kabar tersebut kemudian dinamai *Poetri Hindia* yang terbit pertama kali pada Juli 1908. Surat Kabar *Poetri Hindia* ini menjadi wadah bagi perempuan untuk menuangkan ide-ide mereka. Tulisan ini ingin melihat nilai-nilai perjuangan kaum perempuan yang diimplementasikan melalui sebuah media cetak yaitu Surat Kabar *Poetri Hindia*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tulisan ini diberi judul *Implementasi Nilai-Nilai Perjuangan Kaum Perempuan dalam Surat Kabar Poetri Hindia 1908-1911*.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan kerja yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Lubis, 2008). Tahapan metode sejarah yang *pertama* adalah heuristik. Heuristik merupakan metode pencarian dan pengumpulan sumber, baik primer maupun sekunder, berupa sumber tertulis seperti koran, majalah, foto, artikel, arsip, buku, dan karya tulis ilmiah; sumber benda berupa candi, situs, bangunan cagar budaya; sumber lisan berupa wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikaji (Lubis, 2008). Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diuji melalui tahapan metode sejarah yang *kedua*, yaitu kritik. Untuk melakukan kritik, terdapat dua cara yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern digunakan untuk menilai apakah data yang diperoleh asli atau turunan (otentisitas), sedangkan kritik intern digunakan untuk menilai apakah data yang diperoleh dapat dipercaya atau tidak (kredibilitas) (Lubis, 2008). Data yang telah lolos dari tahapan kritik kemudian diproses melalui tahapan yang *ketiga* yaitu interpretasi. Tahapan ini diperlukan untuk membuat data yang tampaknya terlepas satu dengan lainnya menjadi satu hubungan yang saling berkaitan, sehingga terlihat jelas kausalitasnya. Dari tahapan ini dihasilkan fakta. Fakta yang dihasilkan dan masih saling terlepas satu sama lain itu kemudian disintesis. Setelah itu

² Adat istiadat adalah pola dan tingkah laku suatu kesatuan sosial mengenai pranata-pranata kebudayaan. Pola ini disebarkan melalui proses sosialisasi secara turun temurun. Pelanggaran terhadap pola ini menimbulkan adanya sanksi sosial (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1988: 62)

dilakukan tahapan yang *keempat*, yaitu historiografi atau penulisan sejarah (Lubis, 2008).

Selain metode sejarah, dalam tulisan ini juga diungkapkan mengenai konsep implementasi nilai perjuangan dalam hal ini perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan melalui media cetak surat kabar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sementara itu, pengertian nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Adapun pengertian perjuangan yaitu usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dengan demikian, implementasi nilai perjuangan berarti pelaksanaan upaya-upaya yang berguna bagi kemanusiaan. Dalam hal ini upaya-upaya yang dimaksud adalah upaya bagi kemajuan perempuan pribumi. Implementasinya dilakukan melalui media surat kabar *Poetri Hindia*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kehidupan Perempuan pada Akhir Abad ke-19 sampai Awal Abad ke-20

Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama sebagai makhluk paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Namun, dalam masyarakat di berbagai tempat terdapat perbedaan pandangan tentang status perempuan, sehingga muncul konstruksi yang berbeda-beda mengenai kedudukan perempuan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pandangan tersebut, seperti stereotipe (pelabelan) yang dikaitkan dengan sifat ataupun fisik laki-laki dan perempuan (Sukri dan Ridin Sofwan, 2001: 1). Misalnya, laki-laki dikonsepsikan sebagai makhluk yang lebih kuat jika dibandingkan dengan perempuan. Dari segi fisik/biologis laki-laki lebih kekar dan tegap sehingga diasumsikan lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan perempuan.

Gambaran kondisi fisik seperti itu akhirnya mempengaruhi gambaran konsep pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikonsepsikan bekerja di luar rumah (wilayah publik) yang tantangannya lebih besar karena harus berhadapan dengan alam yang ganas atau sesama manusia yang

tidak segan saling membunuh untuk memperebutkan sesuatu yang terkait dengan kepentingan hidupnya, sedangkan perempuan dikonsepsikan bekerja dalam bidang yang terkait dengan rumah tangga (wilayah domestik) yang tidak banyak mengandung risiko atau bahaya.

Di dalam keluarga bangsawan di Jawa atau yang “berdarah biru”, perempuan memiliki empat peran, yaitu pertama, sebagai hamba Tuhan. Perempuan di Jawa³ pada umumnya menganut agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, atau Budha. Adapun agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kalangan bangsawan adalah agama Islam yang bercampur dengan unsur-unsur ajaran Hindu-Budha, animisme, dan dinamisme. Ajaran yang sinkretik ini dalam masyarakat suku Jawa disebut agama Jawi atau Kejawen (Koentjaraningrat, 1984: 311). Realisasi dari rasa syukur kepada Tuhan diwujudkan dalam *sembah* atau *bekti*. Baik laki-

³ Istilah Jawa memang mempunyai konotasi pengertian yang relatif, tergantung pada bagian mana orang memandangnya. Denys Lombard (2000: 29-39) sendiri mendapatkan istilah “Jawa” dalam pengertian perbedaan barat dan timur yang sifatnya etnolinguistik. Dalam hal ini, Pasundan yang merupakan salah satu sebutan wilayah di Pulau Jawa mempunyai karakteristik tersendiri. Tomé Pires bahkan sudah mengenali tanda-tandanya yang sama sekali berbeda dengan Jawa dan di sana digunakan bahasa yang sangat berbeda yaitu bahasa Sunda. Menurut Lombard, mengenai hal ini, orang Sunda sangat bangga dengan identitas mereka dan tidak pernah ingin dianggap sebagai orang Jawa. Sebaliknya, Lombard mengangkat contoh bahwa pada saat ini, orang yang tinggal di Jakarta atau Bandung (terutama para pembantu) masih mengatakan “pulang ke Jawa” ketika kembali ke kampung halaman di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan perbedaan tersebut, tampaknya masuk akal jika Pulau Jawa terbagi menjadi tiga kelompok sosial budaya, yaitu:

1. Tanah Pasundan;
2. Tanah Jawa yang sebenarnya (Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta); dan
3. Tanah Pesisir (bagian dari daerah pantai yang bermula dari Cirebon di sebelah Barat, hingga Banyuwangi di sebelah Timur) yang ditunjukkan dengan identitas Jawa atau Sunda yang cenderung sudah melemah atau bahkan menghilang (Lombard dalam Rahman, 2006: 5)

laki maupun perempuan wajib menyembah Tuhan selain berbakti kepada kedua orang tua, kedua mertua, saudara tua, guru, dan raja.

Kedua, sebagai anak atau menantu. Anak perempuan sebelum menikah memiliki kewajiban *bekti* (mengabdikan) kepada orang tua. Seorang gadis yang sudah *balig*⁴ harus memasuki masa *pingitan* untuk menunggu pria yang akan melamarnya. Hal ini menjadi kewajiban bagi seorang perempuan terhadap ayahnya dan keluarganya. Secara jelas Kartini mengungkapkan bagaimana kehidupannya dalam budaya *pingitan* melalui surat yang ditulis untuk sahabatnya, Estella Zehandelaar:

“Kau tanyakan kepadaku, bagaimana keadaanku di antara empat dinding tebal itu, kau tentu pikir tentang sebuah sel atau semacamnya. Tidak, Stella, penjaraku adalah sebuah rumah besar, dengan pekarangan luas, tapi sebuah tembok pagar tinggi mengelilinginya, dan pagar itulah yang mengurung aku. Betapa luasnya pekarangan itu, kalau orang harus terus tinggal di situ, menjadi sesak juga rasanya. Aku masih ingat, bagaimana dalam putus asa yang gelap-gelita itu badanku selalu kulemparkan pada pintu-pintu yang terkunci dan pada tembok dingin. Arah manapun yang kutempuh akhir dari perjalanan itu selalu saja tembok batu atau pintu terkunci”.⁵

Dengan *dipingit*, maka kebebasan Kartini pun hilang. Ia harus putus sekolah dan kehilangan kebebasannya sebagai anak-anak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Memasuki masa persiapan sebelum pernikahan untuk seorang anak perempuan berusia 12,5 tahun adalah masa tersulit yang harus dijalani oleh perempuan bangsawan pribumi masa itu.

Cerita Kartini merupakan salah satu cerita yang dapat menggambarkan bagaimana kehidupan perempuan pada akhir abad ke-19.

Pingitan merupakan jalur utama menuju pernikahan, akan tetapi pernikahan yang dipaksakan. Seorang perempuan harus menikah di usia yang masih muda tanpa tahu siapa pria yang akan menikahinya itu. Pada masa itu, pernikahan di usia muda menjadi sesuatu yang harus dijalani oleh perempuan bangsawan pribumi. Jika mereka tidak bersuami maka sama saja dengan berbuat dosa dan memperlakukan keluarganya.

Dalam masa-masa *pingitan*, mereka diajari cara berhias, memasak, dan melayani suami. Cara bergaul dengan laki-laki, cara berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya, dan dengan yang lebih muda. Hal ini dilakukan karena mereka harus menjaga sikap dan ucapan jika sudah diperistri oleh laki-laki bangsawan.

Setelah menikah, pengabdian sebagai anak bertambah dengan wajib berbakti kepada mertua. Oleh karena orang tua adalah perantara anak lahir ke dunia, maka mereka yang menuntun anak dapat menikmati kehidupan ini dan mendapatkan berbagai kepandaian walaupun pada hakikatnya semua itu datang dari Tuhan. Selain orang tua, mertua juga mempunyai andil dalam mencipatakan kebahagiaan anak atau menantu, sebagaimana orang tua kandung karena melalui perantara mertua, perempuan mendapat suami yang dapat memberikan kebahagiaan (Sukri dan Ridin Sofwan, 2001: 70).

Seorang anak juga diharuskan menghormati saudara tua karena dialah yang akan menjadi pengganti bapak jika orang tua sudah meninggal. Begitu pula guru perlu dihormati karena mereka yang membimbing dan menunjukkan jalan untuk menuju keutamaan serta kesempurnaan hidup. Cara berbakti kepada orang tua diantaranya dengan mengikuti perintah-perintahnya yang mengarah kepada kebaikan dan sesuai dengan ajaran agama.

Ketiga, sebagai istri. Pada akhir abad ke-19, seorang perempuan ditempatkan di posisi kedua yaitu pihak yang harus berbakti kepada kaum pria. Tugas seorang istri sangat kompleks dan berat. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan hidupnya dalam berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan. Dalam kedudukannya sebagai istri, perempuan berada

⁴ Menurut Ensiklopedi Islam (1993: 104), *balig* berarti orang yang sudah cukup umur dan telah dibebani tanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Hal inilah yang membedakannya dengan anak kecil. *Balig* dalam Islam ditandai telah haidnya seorang anak perempuan dan mimpi atau *ihtilam* (mengeluarkan mani) bagi anak laki-laki.

⁵ *Surat Kartini*, Jepara 25 Mei 1899, kepada Estella Zehandelaar.

dalam posisi yang lebih rendah daripada suami, sehingga istri harus memperlakukan suami seperti dewa yang dipuja, ditakuti, dan dihormati. Ajaran patuh kepada suami mengharuskan perempuan rela dimadu⁶ oleh suaminya dan harus bersikap baik terhadap madunya. Jika seorang perempuan tidak memperbolehkan suaminya untuk menikah lagi, ia tidak disebut sebagai istri ideal, sebaliknya ia disebut sebagai istri yang tidak tahu tata krama. Dengan tegas, Kartini menggambarkan kehidupan pernikahan perempuan bangsawan pribumi:

“Dan kawin di sini, aduh, dinamakan azab sengsara masih terlalu halus! Betapa nikah itu tiada akan sengsara, kalau hak semuanya bagi keperluan laki-laki saja dan tiada sedikit juapun bagi perempuan? Kalau hak dan pengajaran kedua-duanya bagi laki-laki semata-mata – kalau semua-muanya dibolehkan dia perbuat?”⁷

Peran perempuan yang keempat adalah sebagai ibu. Perempuan berhak untuk mendapatkan penghormatan yang sama seperti bapak dari anak. Sementara itu kewajiban seorang ibu adalah merawat dan mendidik anaknya di rumah sebelum terjun ke lingkungan sosial di luar keluarga (Sukri dan Ridin Sofwan, 2001: 70).

Keempat peran perempuan tersebut dijalankan dengan cara yang berbeda dan sudah diatur menurut adat istiadat. Adat istiadat mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki. Kedudukan seorang istri berada di belakang suami, artinya kegiatan perempuan hanya seputar dapur (memasak), sumur (mencuci), dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami). Pemetaan wilayah kerja bagi perempuan semacam itu kemudian dirangkaikan dengan tugas perempuan, yaitu *macak* (berhias untuk menyenangkan suami), *manak* (melahirkan), dan *masak* (menyiapkan makanan bagi keluarga).

Hal itu menunjukkan sempitnya ruang gerak dan pemikiran perempuan, sehingga perempuan tidak memiliki cakrawala di luar tugas-tugas domestiknya. Sementara itu, kerja di wilayah domestik tidak menghasilkan keuntungan materi, sehingga perempuan tidak dapat mengupayakan atau menciptakan kebahagiaan bagi diri maupun keluarganya.

Kondisi ini dalam masyarakat Jawa di sebut *swarga nunut nraka katut*, artinya kebahagiaan atau penderitaan perempuan tergantung sepenuhnya pada laki-laki (Sukri dan Ridin Sofwan, 2001: 7). Ungkapan itu semakin mempertegas konstruksi budaya yang berkaitan dengan inferioritas perempuan sehingga perempuan digambarkan tidak memiliki peran sama sekali dalam mencapai kebahagiaan hidup, sekalipun untuk dirinya sendiri.

Kedudukan perempuan pribumi dalam bidang pendidikan, juga masih berada di bawah laki-laki. Perempuan pribumi masih tidak mendapatkan izin untuk menempuh pendidikan formal sampai tamat. Walaupun diizinkan hanya sampai sekolah dasar dan hanya terbatas pada perempuan pribumi dari kalangan bangsawan.

Mengenai pendidikan bagi perempuan bangsawan pribumi, pernah disinggung oleh B. H. Lans ketika bekerja sebagai guru di Sukabumi, ia melihat bahwa jumlah anak-anak perempuan yang pergi ke sekolah sangat sedikit bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada (Lans dalam Kosim, 1981: 26).

Hal lainnya yang dianggap krusial yang menjadi penghalang bagi perempuan bangsawan pribumi adalah adanya anggapan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda adalah tempat pengkristenan, sehingga di khawatirkan anak-anak mereka akan menjadi Kristen⁸. Anggapan tersebut muncul

⁶ Permaduan adalah istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut poligami, yaitu bentuk perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, jadi dimungkinkan seorang laki-laki beristrikan beberapa orang perempuan (Suhamihardja, 1997: 36)

⁷ *Surat Kartini*, Jepara, 25 Mei 1899, kepada Estella Zeehandelaar

⁸ Anggapan tersebut muncul dari adanya dikotomi antara Islam dan Kristen. Pemikiran tersebut berlaku umum di masyarakat Hindia Belanda saat itu. Islam selalu diidentikkan dengan pribumi sedangkan orang Belanda dan Eropa lainnya adalah Kristen, sehingga orang-orang pribumi yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah Belanda maupun sekolah-sekolah Melayu yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda sering dituduh menyuruh anak-anak tersebut masuk Kristen, padahal ada di antara guru-guru di sekolah tersebut yang beragama Islam. Maka tidak jarang

dari kalangan pemeluk Islam yang ortodoks (tradisional) yang berlebihan terhadap sekolah yang diadakan untuk perempuan bangsawan pribumi.

Memasuki abad ke-20, mulai Nampak kemajuan bagi perempuan pribumi. Melalui jalur pendidikan, perempuan mulai menunjukkan keberadaan mereka. Pendidikan di Hindia Belanda dilatarbelakangi oleh lahirnya politik etis (*Ethische Politick*). Politik etis merupakan garis politik baru kolonial yang pertama-tama diucapkan secara resmi oleh van Dedem sebagai anggota Parlemen Belanda. Dalam pidatonya pada tahun 1891, dikemukakan keharusan untuk memisahkan keuangan Hindia Belanda dari negeri Belanda. Diperjuangkan pula kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta ekspansi yang pada umumnya menuju ke suatu politik yang konstruktif (Ekajati: 1986, 54).

Sembilan orang perempuan pribumi, semuanya dari kalangan bangsawan, diinterview sebuah tim pemerintah kolonial yang ingin mencari tahu tentang “menurunnya kesejahteraan penduduk pribumi di Jawa dan Madura”⁹. Masalah yang mereka identifikasi sebagai masalah yang paling berat bagi perempuan adalah pendidikan untuk perempuan, penghapusan perkawinan anak, penghapusan permaduan, menentang pelacuran, memberi kesempatan lebih luas untuk perempuan tampil di depan umum (Vreede-De Stuers dalam Wieringa, 1999: 101). Akan tetapi, dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, masalah pendidikan untuk perempuan lebih diutamakan (Wieringa, 1999: 102).

Berawal dari sanalah ide-ide tentang kemajuan perempuan mulai dipopulerkan dimana salah satu medianya adalah melalui surat kabar. Pada awal abad ke-20 banyak bermunculan media cetak seperti surat kabar dan majalah untuk perempuan pribumi, seperti

keluar fatwa dari seorang kyai atau guru ngaji yang mengharamkan sekolah-sekolah Belanda. Bahkan orang yang meniru gaya hidup orang Eropa sering dianggap kafir (Noer, 1996: 8-9)

⁹ *Inquiry into the Declining Welfare of the Native Populations of Java and Madura* (Penelitian tentang Kemerosotan Kemakmuran Penduduk Pribumi Jawa dan Madura) (Vreede-De Stuers dalam Wieringa, 1999:101).

Doenia Istri, Doenia Kita, Pedoman Isteri, Panorama, dan Poetri Hindia.

B. Terbitnya Surat Kabar *Poetri Hindia*

Ide awal dalam menerbitkan Surat Kabar *Poetri Hindia* berangkat dari pemikiran Tirto Adhi Soerjo. Tirto Adhi Soerjo memiliki pandangan bahwa pada awal abad ke-20 tidak ada majalah atau surat kabar yang dapat dijadikan ruang berekspresi bagi kaum perempuan. Surat kabar dan majalah yang telah terbit pada masa itu hanya berpihak pada laki-laki. Kebanyakan dari mereka hanya memuat tulisan dari kaum laki-laki. Hal tersebut menurut Tirto bertolak belakang dengan fungsi pers sebagai alat memajukan bangsa, alat penyebaran ide dan gagasan kemajuan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik kaum perempuan ataupun kaum pria.

Oleh Karena itulah, Tirto ingin menerbitkan surat kabar khusus perempuan. Keinginannya tersebut ia tuangkan dalam tulisan berjudul “Kemadjoean Perempoean Boemipoetra”. Tulisannya tersebut dimuat dalam Pemberitaan Betawi no. 10 tanggal 14 Januari 1903. Melalui tulisannya tersebut, Tirto mengungkap para perempuan pribumi yang menjadi pionir bagi kemajuan perempuan seperti Raden Ayu Lasminingrat, Nyonya Retnaningsih, Nyonya Retnaningrum, Raden Ajeng Kartini, dan Raden Ajeng Rukmini (Toer, 2003: 111).

Gagasan Tirto untuk menerbitkan surat kabar khusus perempuan baru terealisasi pada 1908, satu tahun setelah ia menerbitkan mingguan *Medan Prijaji* (Hasanah, 2011: 24). Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Djoemantan bin Anang Atjil, seorang murid sekolah perempuan di Barabai Afdeeling Kendangan Borneo. Tulisannya tersebut dimuat pada *Poetri Hindia* no. 1 tanggal 15 Januari 1909 (Hasanah, 2011: 24).

Menurut Djoemantan, *Poetri Hindia* diterbitkan pertama kali di Betawi. Terbitan pertamanya tertanggal 1 Juli 1908. Pada halaman muka dari Surat Kabar *Poetri Hindia* diketahui bahwa surat kabar tersebut terbit setiap dua kali dalam satu bulan oleh *Naamlooze Vennootschap Jav Boek en Drukkerij en Handel in Schrijfbehoeften Medan Prijaji*. Kantor redaksi Surat Kabar *Poetri Hindia* berada di

Buitenzorg, sedangkan kantor administrasinya berada di Batavia. *Poetri Hindia* juga memiliki kantor perwakilan di Belanda yang dipimpin oleh J.J. Meijer, seorang mantan asisten residen di Jawa (*Poetri Hindia* no. 1, 2, Th. 1909 dan Toer, 2003:108)

Pada jajaran pimpinan Surat Kabar *Poetri Hindia* diisi oleh R.T.A. Tirtokoesoemo, Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, dan R.S.T. Amidjojo. Mereka adalah para priayi yang menjadi penyokong dana bagi terbitan Surat Kabar *Poetri Hindia*. Adapun nama-nama yang masuk dalam tim redaksi dari Surat Kabar *Poetri Hindia* adalah sebagai berikut:

Hoofdredactrices:

1. Laura Staal, T. Sereal Bogor
Verantwoordelijk
2. Raden Ajoe Tjokro Adi Koesoemogeb
Vischer Tjiandjoer
3. Raden Adjeng Soehito Tirtokoesoemo,
Hfd. Onderwijzires Inl Meisjeschool
Karang Anjar
4. Raden Adjeng Fatimah, Gymn. Mr.
Cornilis
5. Raden Ajoe Siti Habiba, T. Sereal
Buitenzorg
6. S.N. Noerhar Salim Part. Owd. K
Gedang F de Kock
7. Raden Ajoe Mangkoedimedjo,
Djakakarta

Redactrices:

1. Mas Loro Hasiah Rogoatmodjo,
Kweekelinge K.A.
2. Raden Sitna Mariana, Serdang, Tjilegon
3. Raden Aroem, goeroe pekerdjaan tangan
sekolahan perempoean Buitenzorg
4. Raden Ajoe Soetanandika, Tjiamis
5. Raden Ajoe Pringgowinoto, Rembang
6. Princes Fatima, Batjan
7. Raden Ajoe Tirtoadiwinoto, Ponorogo
8. Raden Ajoe Arsad, Batavia
(*Poetri Hindia* no.1, Th. 1909)

Selain itu, terdapat pula keterangan yang menyatakan bahwa Surat Kabar *Poetri Hindia* memang diterbitkan untuk para kaum perempuan di Hindia. Hal tersebut dinyatakan dalam kalimat “soerat kabar dan advertentie boeat istri Hindia”. Sementara itu, untuk

menopang keuangan dari surat kabar ini, selain melalui para donatur yang berasal dari kalangan priyayi, Surat Kabar *Poetri Hindia* juga menyediakan ruang untuk pemasangan iklan yang biayanya berdasarkan kesepakatan antara pemasang iklan dengan pengurus administrasi *Poetri Hindia* di Batavia. (*Poetri Hindia* no. 1 tanggal 15 Januari 1909).

Surat Kabar *Poetri Hindia* menggunakan Bahasa Melayu *lingua-franca* dalam setiap kali terbitannya. Namun demikian, *Poetri Hindia* menerima tulisan penulisan dari berbagai Bahasa seperti Bahasa Jawa, Sunda, Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris Selain itu, *Poetri Hindia* juga menyediakan rubrik Bahasa Belanda dalam setiap terbitannya. Hal tersebut bertujuan agar pada pembaca *Poetri Hindia* dapat belajar Bahasa Belanda karena pada masa itu Bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pada masa itu, Bahasa Belanda memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan Bahasa Belanda dengan baik maka dia dianggap sebagai orang yang terpelajar (*Poetri Hindia*, 1909).

Proses terbitnya Surat Kabar *Poetri Hindia* bukan tanpa hambatan. Diakui oleh Tirto Adhi Soerjo bahwa pada masa awal penerbitan, ia sulit mendapatkan perempuan yang pintar menulis dan dapat dijadikan sebagai pimpinan redaksi. Sehingga, ia selalu mengirimkan surat kesediaan kepada setiap perempuan yang ia dengar memiliki kemampuan menulis. Apabila perempuan itu bersedia mengirimkan tulisannya maka nama perempuan tersebut dicantumkan sebagai penulis dan ia masuk dalam jajaran tim redaksi.

C. Nilai-Nilai Perjuangan Kaum Perempuan dalam Surat Kabar *Poetri Hindia*

Perjuangan kaum perempuan melalui Surat Kabar *Poetri Hindia* dapat dilihat melalui artikel-artikel yang ditulis oleh para penulis yang semuanya perempuan. Implementasi perjuangan kaum perempuan dapat dilihat dalam Surat Kabar *Poetri Hindia* edisi no. 1 tahun 1909. Melalui sebuah artikel berjudul “Lid Istri Hindia” yang ditulis oleh Moetiamah dari Cianjur, dapat dilihat bahwa dia

memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam organisasi Vereeniging Pamitran dimana tidak hanya perempuan yang belum menikah, tetapi juga bagi yang sudah menikah bahkan yang sudah menjadi janda. Selain itu, perempuan tersebut jika suaminya meninggal dunia maka mereka diberi santunan sebesar f 100. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipannya sebagai berikut:

“Maka menoeroet reklame jan saja baroe terima: siapa jang minta djadi lid boleh kirim soerat pada adres: “Vereeniging Pamitran” Bandoeng; Maka saja denger baroe-baroe ini bahoea Istri Hindia bangsa priboemi djanda, bias diterima djadi lid dan mempoenjai hak masoek dan keloewarken soera dalam ALg. Vergandering. Ini atoeran saja rasa baik sekali sebab kalaoe seandaenja lid Raden A mempoenjai istri Raden B maka kalaoe Raden A meninggal doenia ia dapat perteloengan f 100.”

Seruan atas persamaan hak perempuan dan laki-laki dari Moetiamah tersebut dipertegas dalam kalimatnya yang terakhir berbunyi, “Saja berseroe disini, meskipoen Istri Hindia belon bias dipersamakan haknja dengan laki-laki tapi haraplah ia sedikit sedikit bisa mempersamakan haknja sekedar dengan toean-toean sekalian.”

Implementasi perjuangan kaum perempuan selanjutnya terlihat dalam artikel yang ditulis oleh Red S.M. dan Sitisondari. Dalam tulisannya, mereka mengatakan bahwa seorang istri dan anak perempuan selalu dihina, dipandang sebelah mata, dan direndahkan martabatnya padahal sebetulnya perempuanlah yang melahirkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Menurut pemikiran Red S.M. dan Sitisondari, bagaimana mungkin seorang ibu yang bermartabat rendah dapat menghasilkan anak-anak yang mulia dan bermartabat. Dengan demikian, secara implisit kedua penulis tersebut ingin menyampaikan bahwa seorang ibu harus memiliki kemuliaan dan martabat yang tinggi untuk dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang mulia dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang perempuan yang nantinya menjadi ibu harus dibelaki dengan pendidikan sebagai bekal bagi mereka mendidik dan membesarkan anak-anaknya di kemudian hari

(*Poetri Hindia* no. 2, Th. 1909; no. 23, Th. 1909).

Kesadaran berpikir tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan terus dipopulerkan melalui tulisan-tulisan lainnya seperti artikel yang berjudul “Haroes Ditoelad” dimuat dalam *Poetri Hindia* no. 3, Th., 1909. Artikel tersebut menceritakan tentang seorang konglomerat di Jepang yang mendirikan sekolah tinggi di Tokyo untuk perempuan. Di bagian akhir artikel, penulis (tidak dicantumkan) menuliskan sebuah kalimat sebagai berikut:

“Kapankah ada orang hartawan di Hindia Olanda jang soeka memberi sebagian dari wangnja akan digoenakan mendirikan beberapa sekolahan boeat orang prampoeawan Hindia.”

Kalimat tersebut merupakan sindiran bagi para priayi atau orang-orang kaya di Hindia Belanda untuk menggunakan uangnya membangun sekolah bagi perempuan. Selain tulisan tersebut, ada juga tulisan lain yang turut ingin memperjuangkan pendirian sekolah bagi perempuan. Tulisan yang berjudul “Kweekeling Prampoean” (tidak diketahui penulisnya) menceritakan tentang seorang perempuan bernama M. Djaenab yang telah lulus dari ujian *kweekeling* (ujian untuk menjadi guru) dan bekerja di Sekolah Gubernur Cianjur. Melalui tulisannya, penulis berharap M. Djaenab dapat mengajar di sekolah khusus perempuan di Cianjura yang didirikan oleh Boedi Oetomo. Akan tetapi, pada waktu itu Boedi Oetomo belum membuka cabang di Cianjur sehingga sekolah untuk perempuan belum bisa didirikan. Adapun kutipan artikelnya adalah sebagai berikut:

“Tjoba di Tjiandjoer soedah ada Boedi Oetomo nistjaja M. Djaenab bias dibantoe akan memboeka sekolahan prampoea, seperti soedah ada di Bandoeng dan di Bogor antara negeri-negeri pasoendang.” (*Poetri Hindia* no.3, Th. 1909).

Artikel selanjutnya sebagai bentuk implementasi perjuangan perempuan adalah tulisan berjudul “Soedi Mampir”. Artikel tersebut memuat bahwa ada 25 orang perempuan pribumi yang mendaftar sebagai anggota organisasi Perhimpoean Oost en West yang ada

di afdeeling di den Haag, Belanda sebagaimana yang dikutip sebagai berikut:

“Maka adalah 25 perempoean boemi poeta soedah minta djadi lid perhimpoean Oost en West jaitoe dari afdeeling den Haag pada padoeka toean J.J. Meyer bekas Ass. Resident di Djawa dan Redacteur dan wakil kita boeat Europa”. Di bagian akhir artikel tersebut juga terdapat semacam harapan dan himbauan agar lebih banyak lagi perempuan pribumi yang masuk dalam organisasi tersebut, sebagaimana yang dikutip sebagai berikut:

“..... Sebab itoelah maka itoe 25 Istri Hindia sama bersetoedjoe masoek lid pada afdeeling den Haag dari Oost en West, dan kita harap djoega soepaja ada banjak isteri-isteri Hindia lainnja jan akan masoek die itoe perhimpoean...” (*Poetri Hindia* no.3, Th. 1910).

Melalui artikel tersebut dapat dilihat bahwa mereka, para perempuan pribumi, berupaya agar dapat ikut andil dalam kegiatan-kegiatan di ruang publik melalui sebuah organisasi. Perhimpoean Oost en West merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial. Salah satu bentuk kegiatan sosial perhimpunan ini adalah memberikan makan dan tempat tinggal bagi para perempuan pribumi yang datang dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selain itu, mereka juga memberikan rangsangan agar para perempuan pribumi lainnya juga dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi Perhimpoean Oost en West, khususnya dan organisasi-organisasi perempuan lain, umumnya.

KESIMPULAN

Perjuangan kaum perempuan pada awal abad ke-20 meliputi pendidikan untuk perempuan, penghapusan perkawinan anak, penghapusan permaduan, menentang pelacuran, memberi kesempatan lebih luas untuk perempuan tampil di depan umum. Namun demikian, berdasarkan artikel-artikel dalam Surat Kabar *Poetri Hindia*, perjuangan perempuan fokus pada bidang pendidikan dan sosial. Bidang pendidikan meliputi kesempatan untuk sekolah dan pembukaan sekolah-sekolah

khusus perempuan. Kenyataan itu menunjukkan bahwa perempuan semakin sadar bahwa untuk menjadi seorang ibu, diperlukan pendidikan. Hal tersebut dilakukan sebagai bekal untuk mendidik dan menghasilkan generasi yang berkualitas dan bermartabat.

Sementara itu, di bidang sosial meliputi keikutsertaan perempuan dalam organisasi-organisasi sosial sebagai bentuk aktualisasi diri di ruang publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki semakin sadar bahwa sebetulnya tidak ada pembagian kerja wilayah domestik dan publik antara perempuan dan laki-laki. Artinya, baik perempuan maupun laki-laki dapat berkarya di dua ruang publik tersebut. Ada satu kalimat yang menarik dari artikel yang ditulis oleh S.Sum berjudul “Kemadjoean Perempoean” dimuat dalam *Poetri Hindia* no.4, Th. 1909. Kalimat tersebut adalah “laki-laki bersama perempoean mengoeroeskan dapoer”. Kalimat tersebut memiliki makna yang sangat dalam yakni laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam membangun dan membina rumah tangga. Artinya, urusan domestik dalam sebuah rumah tangga juga menjadi urusan laki-laki, bukan hanya perempuan saja. Dengan demikian, pada awal abad ke-20 sebetulnya paradigma berpikir tentang perempuan hanya mengurus wilayah domestik yaitu sumur, dapur, dan kasur sudah mulai terkikis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Tulis Ilmiah

- Amiruddin, Mariana. 2007. “Helene Cixous: Revolusi Sosial, Revolusi Linguistik”. *Jurnal Perempuan*, No. 52, 2007.
- Ekajati, Edi dkk. 1986. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat (s.d. tahun 1950)*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasanah, Lulum. 2011. *Upaya-Upaya Memajukan Kaum Perempuan Pribumi dalam Pemberitaan Surat Kabar Poetri Hindia 1908-1911*. Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Jatinangor.

Kartini. 1983. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka.

Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kosim. E. et al. 1981. *Biografi dan Perjuangan Dewi Sartika*. Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa Dalam*

Silang Budaya Jilid II. Jakarta: Gramedia. Lubis, Nina H. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.

Rahman, Fadly. 2006. *Rijsttafel; Perkembangan Budaya Makan di Pulau Jawa 1870-1942*. Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Sukri, Sri Suhandjati & Ridin Sofwan. 2001. *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.

Toer, Pamoedya Ananta. 2003. *Sang Pemula*. Jakarta: Lentera Dipantara. Vreede-De Stuers, Cora. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Wieringa, Saskia Eleonora. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan*. Jakarta: Garba Budaya.

Artikel dalam Surat Kabar

Djoemantan. "Poetri Hindia, dilahirkan di Betawi 1 Juli 1908". *Poetri Hindia* no. 1, Th. 1909.

"Kweekeling Perempoean". *Poetri Hindia* no. 3, Th. 1909.

Moetiamah. "Lid Istri Hindia". *Poetri Hindia* no. 1, Th. 1909.

"Soedi Mampir". *Poetri Hindia* no. 3, Th. 1909.

Soerjo, Tirto Adhi. "Kemadjoean Perempoean Boemipoetra". *Pemberita Betawi* no. 10, Th. 1903

S. Sum. "Kemadjoean Perempoean". *Poetri Hindia* no. 4, Th. 1909.